

BAB I

PENDAHULUAN

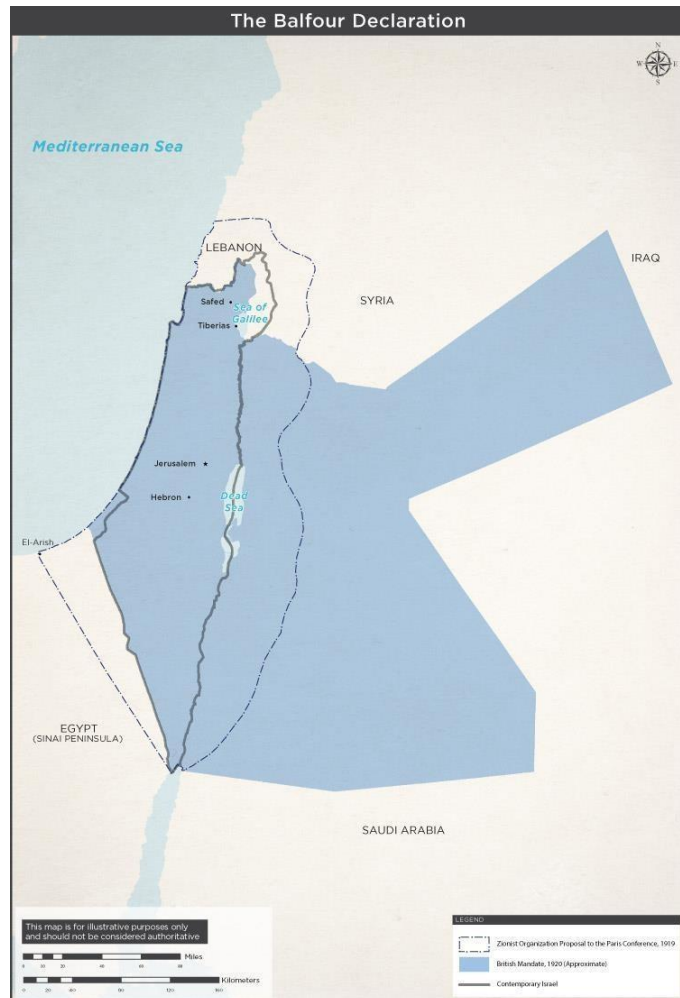
A. Latar Belakang Masalah

Studi ini berfokus kepada proses pengambilan kebijakan oleh pemerintah Inggris yang mampu menghasilkan pendekatan diplomasi kemanusiaan, khususnya dalam konteks dukungan mereka terhadap *Two State Solution* pada Konflik Israel - Palestina. Meskipun Inggris dikenal sebagai salah satu negara barat yang secara umum cenderung mendukung Israel, namun Inggris telah mengambil sikap yang berbeda dari para sekutunya dengan mendukung solusi dua negara. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membahas proses pengambilan kebijakan luar negeri Inggris, yaitu dukungan Inggris terhadap *Two State Solution*, dan menyoroti urgensi bagi Inggris untuk mengembangkan program yang menguatkan usulan ini. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana kebijakan luar negeri Inggris dapat mendukung dan mendorong solusi *Two State Solution* sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian di kawasan tersebut.

Pada 14 Mei 1948, hari yang sama dengan deklarasi kemerdekaan Israel, Inggris secara resmi menarik diri dari Palestina. Akhir dari kekuasaan Inggris di Palestina selain dikarenakan oleh kegagalan Inggris dalam menangani berbagai konflik dan aksi terorisme antara Arab dan Yahudi serta mencegah konflik yang lebih jauh dengan negara-negara Arab lainnya di kawasan (Ravndal, 2010). Sejak saat itu seluruh dinamika geopolitik Timur Tengah berubah ke arah yang lebih jauh. Setelah berbagai peperangan antara negara-negara Arab dan Israel, Resolusi 242 Dewan Keamanan PBB diadopsi pada 22 November 1967, beberapa bulan setelah Perang Enam Hari antara Israel dan negara-negara Arab yakni Mesir, Yordania, dan Suriah (Majid Bozorgmehri, 2011). Perang tersebut meninggalkan Israel menguasai wilayah yang signifikan, termasuk Semenanjung Sinai dari Mesir, Tepi Barat dari Yordania, dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah. Resolusi ini diadopsi dalam

konteks situasi pasca-perang dan mencoba menciptakan dasar untuk penyelesaian konflik yang berlangsung (Kardo Karim Rached Mohammad, 2017).

Gambar 1 keterangan peta Israel pada deklarasi balfour 1917



Sumber: <https://www.gov.il/en/Departments/General/the-balfour-declaration-map>

Gagasan solusi dua negara (*two-state solution*) sudah mulai muncul sejak Resolusi Majelis Umum PBB 181 yang diadopsi pada 1947. Namun, Inggris memilih untuk abstain pada saat itu (Albasoos, 2013). Inggris baru mulai mendukung solusi dua negara secara resmi pada saat Majelis Umum PBB mengadopsi Resolusi 3237 pada tanggal 22 November 1974, Inggris memberikan suara mendukung resolusi tersebut. Resolusi ini memberikan pengakuan kepada Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai wakil sah dari rakyat Palestina dan memberikan PLO hak untuk berpartisipasi dalam debat Majelis Umum (Mielus, 2014). Inggris, sebagai salah satu anggota Majelis Umum PBB, secara formal

menyatakan dukungannya terhadap pengakuan internasional terhadap PLO dan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib mereka sendiri. Melalui dukungan terhadap Resolusi 3237, Inggris berkontribusi pada langkah-langkah awal menuju pengakuan internasional terhadap hak kemerdekaan Palestina dan prinsip-prinsip solusi dua negara.

Selain dukungan melalui keputusan PBB, Inggris telah menyatakan posisinya dalam berbagai pernyataan dan kebijakan luar negeri. Inggris secara tegas menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara melalui keterlibatannya dalam perundingan damai antara Israel dan Palestina (Foreign, Commonwealth, and Development Office, 2023). Partisipasi aktif ini mencerminkan upaya Inggris dalam merespons dan memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Inggris juga mengkritik pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat, menegaskan bahwa pembangunan tersebut dapat menjadi penghambat bagi pelaksanaan solusi dua negara. Posisi Inggris dalam hal ini sesuai dengan kebijakan internasional yang mengecam tindakan-tindakan yang dapat merusak proses perdamaian.

Selain itu, pembahasan mengenai pemukiman Israel di wilayah yang diduduki, terutama di Tepi Barat, Yerusalem Timur, dan Jalur Gaza, telah menjadi permasalahan sentral dalam konflik Israel-Palestina. Pemukiman-pemukiman ini dipandang sebagai salah satu aspek yang paling meruncing dan kompleks dalam upaya mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Persoalan pemukiman melibatkan pertanyaan hak-hak tanah, batasan teritorial, serta dampak besar terhadap kehidupan sehari-hari masyarakat Palestina (Kartal, 2021).

Dalam konteks hukum internasional, pendirian dan ekspansi pemukiman oleh Israel di wilayah yang diduduki dianggap sebagai pelanggaran Konvensi Jenewa Keempat, yang melarang pihak yang menduduki untuk menetapkan penduduk sipil di wilayah yang dikuasai. Resolusi-resolusi PBB, terutama Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 338, secara konsisten mengecam dan menuntut penarikan Israel dari wilayah yang diduduki, termasuk pembangunan pemukiman. Pertumbuhan dan ekspansi pemukiman Israel telah menciptakan kondisi yang sulit

bagi masyarakat Palestina. Proses ini melibatkan penggusuran, pengambilalihan tanah, dan pembangunan infrastruktur yang membatasi gerak dan kemandirian masyarakat Palestina. Selain itu, pemukiman ilegal telah menjadi penghalang nyata terhadap tercapainya solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan.

Gambar 2 Keterangan peta Israel pada 1967 yang dianggap sebagai pemukiman



Sumber: <https://www.aljazeera.com/wp-content/uploads/2021/05/INTERACTIVE-Ethnic-cleansing.png?w=770&resize=770%2C770&quality=80>

Upaya internasional – terutama Inggris – untuk mengancam dan menekan Israel terus berlanjut. Beberapa negara dan kelompok pengamat menggambarkan pemukiman sebagai penghalang serius terhadap perdamaian dan menekankan perlunya menghentikan pembangunan dan ekspansi pemukiman. Meskipun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pemukiman terus berkembang, menimbulkan ketidakpastian terhadap masa depan negosiasi damai dan potensi tercapainya solusi dua negara yang diakui secara luas. Dengan berlanjutnya pembangunan pemukiman, isu ini tetap menjadi fokus utama dalam dinamika konflik Israel-Palestina.

Kemudian setelah meletusnya intifada pertama (1987), yakni pada 1991 Middle East Peace Process (MEPP) resmi dimulai. MEPP, mencerminkan kebutuhan dan aspirasi internasional untuk mengatasi konflik yang berlarut-larut antara Israel dan Palestina di kawasan Timur Tengah (Saleem, 2021). Sebelum tahun 1991, sejumlah upaya sudah dilakukan untuk menyelesaikan konflik, tetapi pertemuan-pertemuan dan inisiatif-inisiatif tersebut belum mencapai tingkat kerangka kerja yang terstruktur. Tahun 1991 menjadi penanda awal bagi serangkaian upaya diplomatik yang lebih terkoordinasi dan terfokus. Konferensi Perdamaian Madrid, yang diadakan pada bulan Oktober 1991, menandai titik awal MEPP. Konferensi ini disponsori oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dan dihadiri oleh sejumlah besar pihak, termasuk perwakilan Israel, Palestina, dan negara-negara Arab (Laura Zittrain Eisenberg, 2010). Meskipun tidak menghasilkan kesepakatan langsung, konferensi ini membuka jalan bagi pembukaan jalur diplomatik dan perundingan lebih lanjut.

Pada tahun yang sama, Perang Teluk Pertama membuka peluang baru untuk memajukan upaya perdamaian. Konferensi Madrid diikuti oleh serangkaian perundingan langsung antara Israel dan sejumlah negara Arab, serta perwakilan Palestina. Meskipun perundingan ini memiliki tantangan besar, mereka menciptakan landasan bagi Perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO). Perjanjian Oslo membawa pembentukan Otoritas Palestina dan memberikan kerangka kerja untuk kerja sama lebih lanjut antara Israel dan Palestina (Knell, 2023). Sejak saat itu, MEPP terus melibatkan inisiatif-inisiatif diplomatik, perundingan, dan pertemuan tingkat tinggi, melibatkan berbagai aktor internasional, termasuk Inggris sebagai bagian dari Kuartet Internasional untuk Timur Tengah.

Selain itu, dalam isu yang lebih sensitif lagi seperti status Yerusalem, Inggris telah menekankan pentingnya penyelesaian yang adil dan berkelanjutan yang mengakomodasi kepentingan kedua belah pihak. Inggris – yang saat itu dipimpin oleh Theresa May – juga mengecam keputusan Amerika Serikat untuk memindahkan kedutaan besar mereka ke Yerusalem pada tahun 2018, mengingat hal ini dapat memiliki implikasi serius terhadap stabilitas dan prospek solusi dua negara.

Theresa May dalam sebuah pernyataannya menyebutkan bahwa “Kami yakin ini tidak membantu dalam hal prospek perdamaian di kawasan... Kedutaan Besar Inggris untuk Israel berbasis di Tel Aviv dan kami tidak punya rencana untuk memindahkannya,” katanya dalam sebuah pernyataan kepada wartawan. Kemudian pada 18 Desember 2017, Dewan Keamanan PBB mengadakan pemungutan suara terkait resolusi yang mengecam keputusan Amerika Serikat untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan rencananya untuk memindahkan Kedutaan Besar AS ke kota tersebut (Reuters, 2017). Resolusi ini diajukan oleh anggota Dewan Keamanan yang mewakili negara-negara Arab, dan pertemuan tersebut memperlihatkan kekhawatiran internasional mengenai potensi eskalasi ketegangan di Timur Tengah akibat keputusan tersebut.

Dalam pemungutan suara tersebut, sebanyak 14 dari 15 anggota Dewan Keamanan - termasuk Inggris memberikan suara mendukung resolusi yang mengecam tindakan Amerika Serikat. Negara-negara tersebut, termasuk negara-negara Eropa seperti Prancis, Inggris, dan Italia, menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap keputusan AS yang dianggap merusak prospek perdamaian di kawasan tersebut. Namun, satu-satunya anggota yang memberikan suara menentang resolusi tersebut adalah Amerika Serikat, yang menggunakan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan (Al Jazeera, 2017). Tindakan ini secara efektif menggagalkan usaha mayoritas anggota untuk mengeluarkan pernyataan resmi mengecam keputusan Amerika Serikat.

Keterlibatan Inggris dalam proses voting tersebut mencerminkan pandangan negara itu terhadap keputusan AS dan dampaknya terhadap situasi di Timur Tengah. Meskipun Inggris memberikan suara mendukung resolusi, perlu dicatat bahwa suara ini bukanlah suatu tindakan yang dapat mengubah hasil, mengingat adanya veto Amerika Serikat. Namun keterlibatan Inggris, sebagai penjaga Mandat di Palestina, memainkan peran yang signifikan dalam membentuk dinamika konflik tersebut. Deklarasi Balfour pada tahun 1917 memberikan landasan untuk aspirasi nasional Yahudi di wilayah tersebut. Selain itu, dukungan Inggris terhadap Resolusi PBB 181 pada tahun 1947, yang merekomendasikan solusi dua negara, mencerminkan komitmen awal terhadap pendekatan ini dalam penyelesaian konflik.

Perkembangan selanjutnya dari solusi dua negara, meskipun diinisiasi dengan baik, menghadapi kompleksitas dan tantangan yang terus berlanjut. Skripsi ini akan mengeksplorasi peran Inggris dalam konteks solusi dua negara, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan upaya perdamaian, menganalisis dampaknya terhadap dinamika konflik Israel-Palestina, dan mencari perbedaan antara Inggris dengan negara barat lainnya dalam isu ini. Rangkuman latar belakang ini akan menjadi dasar yang kuat untuk merinci kerangka teoretis, metodologi penelitian, dan analisis lebih lanjut dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah diajukan untuk memudahkan penganalisaan mengenai permasalahan yang didasarkan pada identifikasi masalah, oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

“Mengapa Inggris konsisten untuk mendukung konsep Two State solution?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mendasari kebijakan Inggris dalam mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina.
2. untuk menganalisa proses pembentukan kebijakan Inggris sebagai upaya yang negara yang mendukung “Two State Solution” pada isu konflik Israel-Palestina 2023.

D. Landasan Teori

1. Teori pengambilan kebijakan luar negeri

Untuk memahami mengapa Inggris mendukung solusi dua negara, penting untuk melihat latar belakang awal dukungan Inggris terhadap konsep tersebut yang tercermin dalam Resolusi 242. Resolusi ini diadopsi setelah Perang Enam Hari antara Israel dan negara-negara Arab. Oleh

karena itu, Penulis menggunakan teori pengambilan kebijakan politik luar negeri sebagai media identifikasi Inggris menyetujui 2 state solution.

Menurut William D. Coplin dalam bukunya yang berjudul *Introduction to international Politic: Model of Decision Making Proses*, Mengatakan:

“To be interested in why states behave as they do interest area, we have to be interested in why their leaders make the decision. On the contrary, any given foreign policy act may be viewed as the result of three board categories of considerations affecting the foreign policy decision maker state. The first is the domestic politics within the foreign policy decision makers state; the second is the economic and military capability of the state; the third is the international context the particular position in which his state finds itself especially in relation to other state in sistem.” Dari kutipan diatas, menjelaskan bahwa menurut Coplin kebijakan luar negeri merupakan hasil dari tiga pertimbangan yang saling mempengaruhi satu sama lain terhadap pengambil kebijakan.

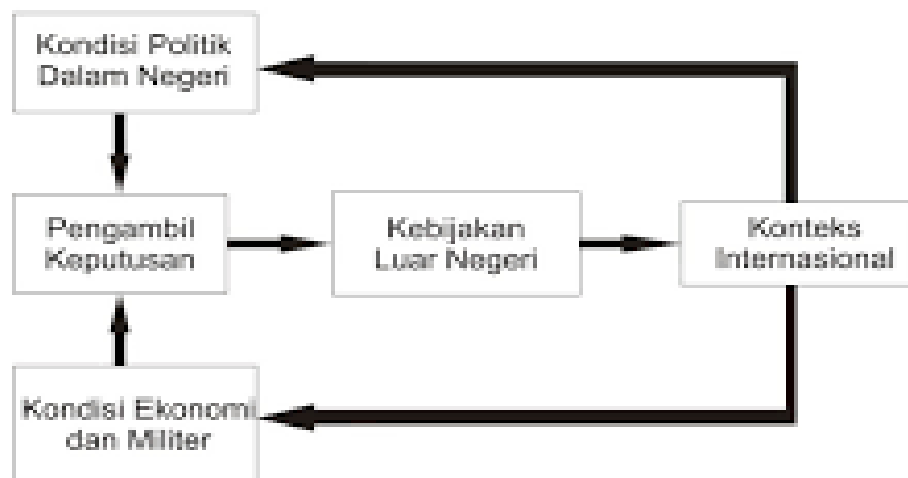
Dalam proses pengambilan keputusan, ada tiga komponen yang dipertimbangkan. Pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua, kekuatan ekonomi dan militer; dan ketiga, situasi internasional yang menentukan posisi suatu negara di dunia. Faktor-faktor seperti partai politik, birokrasi, pemangku kepentingan, dan media massa sangat memengaruhi kebijakan dalam negeri.

Coplin juga menekankan tiga metrik penting dalam pembuatan kebijakan internasional: peran kelompok kepentingan, pengaruh birokrasi dalam politik domestik, dan peran partai politik. Kelompok kepentingan seringkali memainkan peran penting dalam sistem politik yang terbuka, tetapi mereka tidak selalu bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi negara. Kebijakan politik internasional dipengaruhi oleh aspek kedua, kekuatan ekonomi dan militer. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh sejarah, kapasitas produksi, ketergantungan perdagangan internasional, dan peran militer dan keamanan nasional. Faktor terakhir merupakan aspek yang berbeda dari yang dibahas sebelumnya. Dalam

konteks internasional, dinamika dalam negeri yang mencakup aspek politik, ekonomi, dan militer tidak sama dengan dinamika dalam negeri lainnya. Sikap suatu negara dipengaruhi oleh hubungan antarnegaranya dan keadaan di lingkungan internasional. Kebijakan politik luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh hal-hal seperti ekonomi, politik, geografi, perdagangan antarnegara, dan keterlibatan dalam organisasi internasional. Semua pertimbangan ini berhubungan satu sama lain dan memengaruhi proses pengambilan keputusan. Disebabkan kekuatan ekonomi dan militer yang sama dalam membentuk kebijakan internasional, ketiga pertimbangan ini saling mempengaruhi dan saling mempengaruhi dalam pengambilan keputusan politik internasional. (Coplin, Suryana, & Marbun, 1992)

Pada sudut pandang teori ini, penulis akan mengimplementasikan proses pembentukan kebijakan awal mula Inggris yang mendukung konsep Two state solution melalui bagan teori pengambilan kebijakan luar negeri oleh William D.Coplin pada gambar berikut :

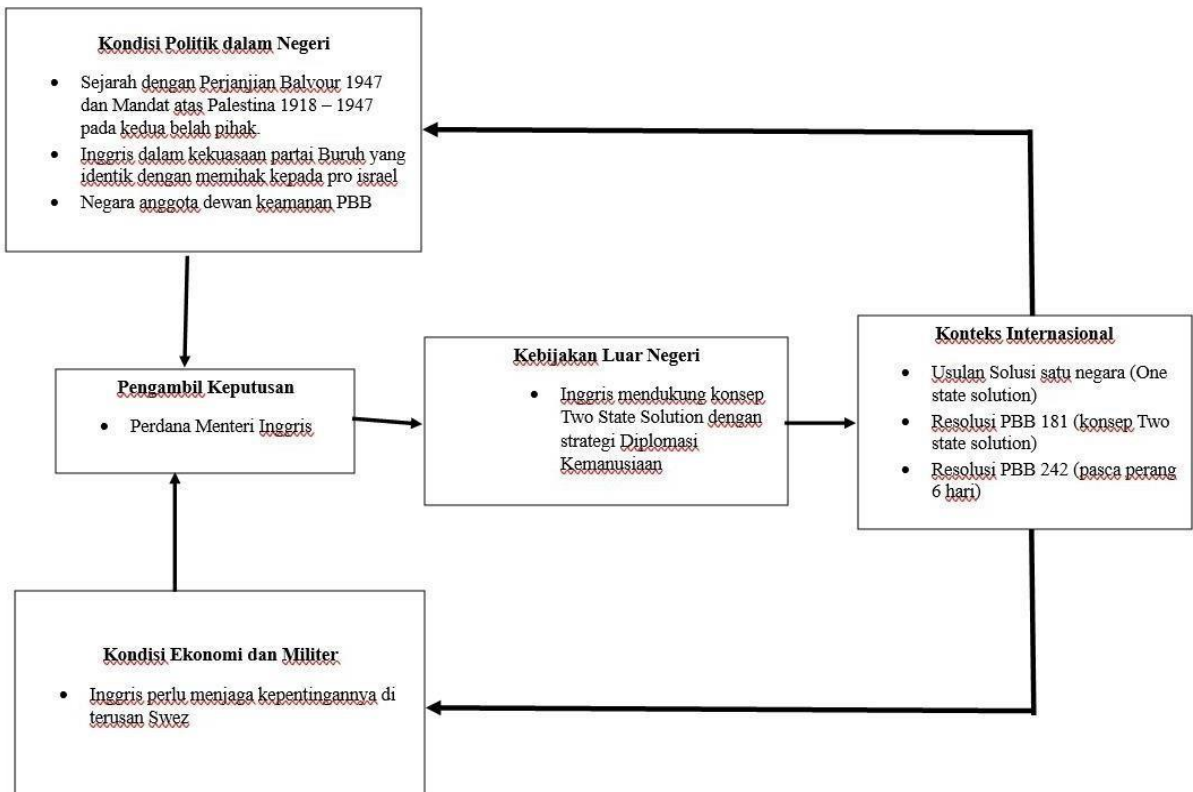
Gambar 3 Bagan teori pengambilan kebijakan luar negeri oleh Willliam D. Coplin



Sumber: <https://assets.kompasiana.com/items/album/2022/06/01/screenshot-84-6296e82cbb448604b24f7302.png?t=o&v=770>

Bagan implementasi teori pengambilan kebijakan luar negeri menurut William D.Coplin :

Gambar 4 Bagan implementasi teori pengambilan kebijakan luar negeri menurut William D.Coplin



Sumber: <https://assets.kompasiana.com/items/album/2022/06/01/screenshot-84-6296e82cbb448604b24f7302.png?t=o&v=770>

Sesuai dengan apa yang dikatakan coplin pada teorinya pada tiga metrik penting yang mempengaruhi pembuatan kebijakan luar negeri, dimana pada studi kasus ini, masuk kepada metrik ke tiga yakni Dalam konteks internasional, sikap suatu negara dipengaruhi oleh hubungan antarnegaranya dan keadaan di lingkungan internasional. Inilah yang dialami oleh Inggris dimana Inggris memiliki latar belakang hubungan antar kedua belah pihak komunitas yang membuat Inggris harus cermat dalam menempatkan diri pada konflik Israel- Palestina kala itu. Berdasarkan implementasi teori pembuatan kebijakan yang peneliti jabarkan diatas, terdapat tiga komponen yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan Inggris yakni :

1. Terdapat beberapa aspek pada kondisi politik dalam negeri Inggris yang menjadi faktor pengambilan Keputusan berupa kebijakan luar negeri nantinya antara lain:
 - Kondisi politik dalam negeri Inggris: Inggris memiliki sejarah pada kedua belah pihak baik itu dari bangsa Yahudi, dan juga bangsa Palestina. Pada bangsa Yahudi, Inggris mengeluarkan pernyataan resmi melalui deklarasi Balfour pada 2 November tahun 1917 sebagai bentuk dari komitmen Inggris terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. (The Editors of Encyclopaedia Britannica, 2023)
 - Lalu pada bangsa Palestina Inggris memiliki Sejarah dengan mandat atas Palestina dimana mandat tersebut diberikan oleh liga bangsa-bangsa kepada Inggris untuk menetapkan tanggung jawab administratif Inggris atas wilayah Palestina setelah berakhirnya perang dunia I. dimana mandat ini ditetapkan pada tahun 1922. Walaupun mandat ini bertujuan untuk membantu pendirian tanah air nasional bagi bangsa yahudi, namun mandat ini tetap memperhatikan hak-hak Masyarakat arab di wilayah Palestina. (Britanica, n.d.)
 - Inggris sedang berada pada pemerintahan perdana menteri Harold Wilson, dimana Harold Wilson ini merupakan Perdana menteri yang berasal dari partai buruh Inggris (Labour Party). Dimana partai ini dikenal sebagai partai yang cenderung berpihak kepada Israel, sehingga menjadi salah satu faktor proses pemberian tanah air bangsa Yahudi di Palestina dapat terealisasikan. (D'Agata & Gray, 2021)
 - Inggris merupakan negara anggota keamanan tetap PBB pada saat itu, dimana sebagai anggota Dewan Keamanan PBB dan negara besar dengan pengaruh global, Inggris memiliki kepentingan dalam mempertahankan peran diplomatik dan memainkan peran penting dalam pencarian solusi untuk konflik internasional, termasuk konflik Israel-Palestina. (UNITED NATIONS FOUNDATION, 2012)

2. Kekuatan ekonomi dan militer Inggris memiliki kepentingan di terusan Suez yang dianggap sebagai jalur penting dan rentan bagi Inggris dalam konteks kepentingan militer dan ekonomi. Jalur ini merupakan jalur utama yang menghubungkan Inggris dengan koloninya di seberang laut, memungkinkan aliran perdagangan yang vital dan pengiriman pasukan militer ke wilayah-wilayah strategis seperti India, Singapura, dan Australia. Terusan tersebut sangat penting bagi Inggris untuk menjamin kelancaran aliran minyak dan persediaan logistik bagi keperluan militer. Terusan Suez juga menjadi simbol kekuatan imperial Inggris di wilayah Timur Tengah, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan dominasi politik dan ekonomi di wilayah tersebut. (GOV.UK, 2016)
3. Terdapat usulan dari bangsa Arab berupa konsep "one state solution" yang diusulkan oleh beberapa pihak, terutama oleh bangsa Arab namun telah menjadi topik kontroversial dalam penyelesaian konflik Israel-Palestina. Usulan ini muncul pada berbagai pertemuan penting, termasuk pada pembentukan Negara Israel pada 1948, pasca-Perang Enam Hari tahun 1967, pembahasan Perjanjian Oslo tahun 1993, dan selama pertumbuhan pemukiman Israel di Tepi Barat. Meskipun awalnya dianggap sebagai alternatif yang menjanjikan, konsep ini dihadang oleh penolakan yang kuat, terutama dari Israel dan pendukungnya. Alasan penolakan utamanya meliputi kekhawatiran atas identitas nasional dan keamanan Israel, serta sulitnya mengintegrasikan dua populasi yang saling berselisih. Israel, sebagai negara Yahudi, merasa bahwa konsep satu negara mengancam eksistensinya. Kekhawatiran akan keamanan nasional juga menjadi alasan penting, mengingat ketegangan yang dapat timbul dari integrasi demografis besar-besaran. Pertumbuhan pemukiman Israel di Tepi Barat juga memperumit situasi, memperkuat klaim Israel atas wilayah tersebut dan menimbulkan ketidakpastian hukum dan politik dalam kerangka solusi satu negara. Meskipun konsep ini tetap ada dan mendapat dukungan dari beberapa pihak, solusi dua negara tetap menjadi fokus utama dalam upaya perdamaian resmi, sementara konsep satu negara terus memunculkan kontroversi dan perdebatan yang mendalam. (Amal, 2020)

Situasi internasional yang menentukan posisi suatu negara di dunia, dimana Inggris dihadapkan oleh situasi konflik Israel - Palestina pada perang 6 hari yang menyangkut Isreal, Mesir, Yordania, dan Suriah. Meningkatnya ketegangan dan konflik antara Israel dan negara-negara Arab menyebabkan Perang Enam Hari. Peningkatan ini didorong oleh berbagai faktor, seperti ketegangan politik, perselisihan wilayah, klaim teritorial, dan ancaman serangan militer bertubi-tubi dari kedua belah pihak. Salah satu penyebab utama adalah eskalasi ketegangan militer yang menyebabkan konfrontasi besar-besaran dan blokade Selat Tiran oleh Mesir, yang merupakan jalur maritim penting bagi Israel. (Augustyn., 2023)

Dari tiga komponen yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan luar negeri Inggris diatas, dapat disimpulkan bahwa terbentuknya kebijakan luar negeri Inggris berupa dukungannya terhadap konsep *Two state solution* (Solusi dua negara) dengan cara melakukan diplomasi kemanusiaan kepada negara yang terdampak yakni negara Palestina, setelah beberapa tahun berperan pada konflik tersebut, Inggris masih tetap konsisten mendukung konsep *Two state solution* dengan cara memberikan bantuan kepada Palestina, seperti pada eskalasi konflik tahun 2014, Inggris banyak memberikan bantuan keuangan kepada UNRWA (Asosiasi Bantuan dan Kerja Internasional untuk Pengungsi Palestina di Timur Jauh). Hal ini menunjukkan peran Inggris dalam diplomasi kemanusiaan dengan masyarakat Palestina. Melalui dukungan keuangan sebesar £5,9 juta pada tahun 2014 dan £2,2 juta tambahan pada bulan Desember 2014, Inggris secara langsung membantu pengungsi Palestina di Suriah, terutama di wilayah Yarmouk yang terkepung. Berfokus pada kelompok yang paling rentan, seperti kepala rumah tangga perempuan, orang lanjut usia, dan pengungsi, bantuan tunai dan penyediaan pakaian musim dingin dimaksudkan untuk mengurangi kerentanan ekstrim dan meningkatkan ketahanan pengungsi Palestina menghadapi konflik bersenjata, terutama menjelang musim dingin keempat di Suriah (UNRWA, 2014). Melalui bantuan keuangan sebesar £5,9 juta pada tahun 2014 dan £2,2 juta tambahan pada bulan Desember 2014 yang diberikan Inggris melalui UNRWA,

menunjukkan bahwa Upaya Inggris dalam berdiplomasi dengan cara memonitoring bantuan Program sebagai aktor negara yang menyumbangkan uangnya melalui badan bantuan resmi PBB kepada pengungsi Palestina dalam menghadapi musim dingin. (UNRWA, 2014).

Inggris juga terus memberikan bantuannya pada tahun 2023, Inggris memberikan total bantuan sebesar £87 juta kepada Wilayah Pendudukan Palestina, setara dengan sekitar US\$109 juta. Ini termasuk sumbangan sebesar £60 juta yang diumumkan pada bulan Oktober/November 2023, mencapai US\$75 juta, Demikian kebijakan Inggris dibuat tentunya dipengaruhi oleh kondisi politik dalam negeri, kondisi militer, dan ekonomi yang masing masing komponen memiliki peran sekaligus menjadi faktor terbentuknya kebijakan luar negeri Inggris. (UK Parliament, 2024)

E. Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah, hipotesa yang dapat diambil penulis adalah sebagai berikut:

Kebijakan Inggris dalam mendukung solusi dua negara (Two-State Solution) dalam konflik Israel-Palestina dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Kondisi politik dalam negeri seperti sejarah dengan perjanjian Balfour 1947 dan mandat atas Palestina 1918 – 1947 terhadap kedua belah pihak.
2. Kondisi ekonomi dan militer, Inggris perlu menjaga kepentingannya di Terusan Swaz.
3. Konteks Internasional meliputi usulan solusi dua negara (one state solution), Resolusi PBB 181 (konsep two state solution), Resolusi PBB 242 (pasca perang 6 hari)

Semua ini tercermin melalui strategi diplomasi kemanusiaan Inggris yang konsisten dan dukungan terhadap resolusi PBB serta bantuan keuangan kepada UNRWA hingga tahun 2023.

F. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan penulis adalah dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang juga bersifat deskriptif yang didukung oleh data yang bersumber dari data sekunder. Yaitu data yang dikumpulkan dari website resmi kebijakan Inggris seperti GOV.UK, portal berita seperti CNN, Aljazeera, BBC, dan penelitian – penelitian ilmiah terdahulu mengenai pembentukan kebijakan dan diplomasi kemanusiaan Inggris dari portal jurnal resmi seperti google scholar.

G. Kerangka Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, Peneliti membagi pembahasan menjadi 4 bab yang akan saling berkaitan dengan sistematika sebagai berikut:

Pada **BAB I**, Pada bab ini berisikan latar belakang masalah mengenai Sejarah singkat konflik Israel – Palestina dan kedudukan Inggris sebagai negara yang mendukung *Two state solution*, rumusan masalah yang menanyakan alasan Inggris mendukung konsep *Two-state solution* dan Upaya nya pada tahun 2023, landasan teori yang menggunakan teori Pengambilan kebijakan luar negeri yang membantu dalam mencari alasan Inggris sebagai negara yang mendukung konsep Solusi dua negara dan teori Diplomasi Kemanusiaan sebagai teori yang membantu memperkuat Upaya Inggris sebagai negara yang mendukung *two state solution* dan upayanya kepada konflik Israel - Palestina, hipotesis sebagai dugaan sementara penulis , tujuan penelitian yang berisikan identifikasi faktor-faktor utama dan proses yang mendasari kebijakan Inggris dalam mendukung *Two-state solution* pada konflik Israel-Palestina serta upayanya pada tahun 2023 sebagai negara yang mendukung *Two-state solution*, metodologi penelitian dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan dukungan data-data yang bersumber dari data sekunder.

Pada **BAB II**, membahas mengenai Sejarah, konflik, dan pembahasan mengenai Dukungan Inggris terhadap *Two-state solution* pada tempo 1912-1948 yang dimulai dari Pencetusan deklarasi Balfour, Jatuhnya mandat atas Palestina terhadap Inggris, dan Deklarasi Kemerdekaan Israel serta lepasnya kekuasaan Inggris atas madat Palestina. Pada bab ini juga membahas mengenai faktor internal dan faktor eksternal Inggris dalam mendukung *Two State solution*.

Pada **BAB III**, akan membahas mengenai strategi diplomasi kemanusiaan Inggris sebagai negara pendukung *two state solution* pada konflik israel Palestina tahun 2023. Pada

bab ini menjelaskan Strategi diplomasi kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak Inggris terhadap eskalasi konflik Israel – Palestina pada tahun 2023.

Pada **BAB IV**, penulis akan menuliskan mengenai penutup sebagai halaman terakhir dari skripsi yang berisikan kesimpulan dari hasil analisis penulis mengenai upaya Inggris sebagai negara pendukung two state solution pada konflik israel Palestina 2023.